



PEMBERDAYAAN

# Berharap Koperasi Ikuti Zaman

KOPERASI sebagai saka-guru perekonomian Indonesia memiliki potensi besar menyejahterakan masyarakat. Itu sebabnya koperasi harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ditandai pesatnya kemajuan teknologi.

Harapan ini disampaikan oleh Wakil Walikota (Wawali) Yogyakarta Heroe Poerwadi saat menghadiri sarasahan hari koperasi ke-70 di Balai kota Yogyakarta, Senin (17/7).

"Perkembangan koperasi dewasa ini berjalan di tengah-tengah era globalisasi serta memasuki era pasar bebas. Koperasi harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, sehingga bisa mengantisipasi konsekuensi yang ada," ujarnya.

Memang, banyak permasalahan di era digitalisasi ini. Di antaranya, berkurangnya pedagang di pasar. Ini terjadi bukan karena daya beli masyarakat berkurang melainkan jumlah pedagang berkurang disebabkan adanya perubahan cara berbisnis

saat ini. Artinya, sudah ada pergeseran cara berdagang, semula konvensional beralih ke digitalisasi dengan memanfaatkan e-commerce.

Heroe mencontohkan, di pusat-pusat perdagangan belakangan ini seperti Mangga Dua dan Tanah Abang Jakarta, daya belinya cenderung menurun disebabkan pengaruh perkembangan cara berdagang.

Oleh karena itu koperasi harus bisa mengantisipasi perkembangan teknologi tersebut. Koperasi juga harus bisa menyelesaikan persoalan manajemen serta persoalan kepentingan dunia usaha terutama menyangkut marketing yang berkaitan dengan e-commerce.

Heroe meminta para pegiat koperasi bisa menghasilkan pemikiran dan memiliki sikap inovatif menciptakan kegiatan kreatif dalam rangka meningkatkan eksistensi koperasi, memperjuangkan serta menyalurkan aspirasi koperasi.

Koperasi akan semakin kuat apabila dibangun atas

kemampuan dan inisiatif sendiri, sembari mensinergikan berbagai ide, dana dan sumber daya yang ada untuk bersatu memajukan koperasi tersebut.

Menurut dia, ini bisa diraih dengan meningkatkan peran serta anggota, meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat serta mampu memutar roda operasional koperasi dengan baik.

Para pengurus koperasi perlu melihat peluang-peluang serta area layanan yang baru. Kalau bisa, turun ke lapangan untuk membantu memecahkan persoalan manajemen yang dihadapi para pelaku usaha, serta menjadikannya sebagai mitra kerja untuk memperbanyak pelaku usaha dengan membangun kerja sama pelatihan.

**Kongres**

Sementara itu, Kongres Koperasi III yang berlangsung 13-15 Juli 2017 di Makassar Sulawesi Selatan melahirkan enam poin yang terangkum dalam bentuk Deklarasi Makassar.

"Ada enam poin yang diajukan kepada pemerintah sebagai sikap Dewan Koperasi Indonesia untuk dilakukan perubahan dalam bentuk Deklarasi Makassar," kata Nurdin Halid. Ketua Dekopin, Jumat pekan lalu.

Deklarasi Makassar berisi enam poin yakni pertama, Deklarasi Makassar untuk informasi komitmen membangun perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan Koperasi sebagai pilar negara.

Kedua, menyepakati usulan yang diajukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan sensus Koperasi Nasional (Suskopnas) sekali dalam 10 tahun sebagai penguatan implementasi *roadmap* pembangunan Koperasi.

Ketiga, menyepakati dan meluncurkan *roadmap* 30 tahun pembangunan koperasi.

Keempat, menyepakati dan meluncurkan *roadmap* 30 tahun pengembangan dan pendidikan Koperasi.

Kelima, menyepakati penyelenggaraan Kongres

Koperasi secara reguler lima tahun sekali untuk mengkaji ulang pelaksanaan, melakukan penguatan implementasi, dan menyusun prospek perkembangan koperasi lima tahunan.

Dankelima menyepakati usulan untuk memperkuat struktur dan menambah kewenangan Kementerian Koperasi dan Pembinaan Kewirausahaan.

Kongres ini dijadikan sebagai tonggak sejarah gerakan koperasi untuk melakukan pembaruan dan perubahan dengan membangun sinergi bisnis koperasi serta modernisasi guna meningkatkan SDM dan penguasaan teknologi manajemen bagi koperasi.

Kongres koperasi pertama diadakan di Tasikmalaya Jawa Barat tahun 1947 dan menghasilkan keputusan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang diperingati setiap tahunnya.

Kongres Koperasi II dilaksanakan di Kota Bandung Jawa Barat. Salah satu keputusannya, menetapkan Proklamator Bangsa, Bung Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

**Bermasalah**

Memang, tidak sedikit nasabah koperasi yang bermasalah. Pprihatin dengan kondisi itu, empat mahasiswa Universitas Muria Kudus Jawa Tengah menciptakan sistem informasi berbasis mobile untuk melacak nasabah koperasi bermasalah itu, atau yang masuk dalam daftar hitam karena tidak membayar pinjaman. Empat mahasiswa itu adalah Budi Hantomo, Mahfiah Nurul Ismi, Tajul Alwi dan Ardi Irfanto.

Sistem informasi anggota koperasi (Simako), menurut Budi Hantomo, Rabu kemarin, mampu mempermudah identifikasi anggota koperasi yang bermasalah karena pencarian secara konvensional tentu membutuhkan waktu lama.

Dengan sistem informasi tersebut, anggota koperasi yang dinilai memberikan

catatan buruk tidak bisa melakukan pinjaman di koperasi lain. Perancangan sistem informasi tersebut dilakukan dengan pembuatan *usecase* yang bertujuan agar konsep yang dibuat pada aplikasi Simako dapat efektif dan nyaman dipakai pengguna.

Aplikasi Simako berbasis mobile ini menggunakan teknologi hybrid platform, desain user interface (UI). Pada halaman login, aplikasi Simako akan dioperasikan oleh admin atau pengurus koperasi. Simako memiliki beberapa tampilan menu, yakni pencarian data anggota, info penting, bantuan, kritik, saran dan menu admin.

Budi menjelaskan, untuk

mendapatkan data anggota, harus memasukkan identitas anggota terlebih dahulu. Setelah itu, data anggota koperasi akan keluar lengkap berikut data pinjaman dan tunggaknya.

Dosen pembimbing Tri Listyorini menambahkan, Simako bisa digunakan untuk mengatasi kolektabilitas pada forum komunikasi dan kerja sama koperasi di wilayah Pati.

Semakin banyak koperasi yang menerapkan sistem ini, maka data yang ada semakin akurat dan sistem yang berjalan semakin optimal. Sistem informasi tersebut sempat dua kali dibajak, sehingga harus dilakukan perbaikan sistem keamanannya. ●

(\*ant)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005